



**Program Penguatan Kapasitas dan
Peran Organisasi Masyarakat Sipil
dalam Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh
2006 - 2009**



**Program
Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil
dalam Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh
2006 - 2009**

Kerjasama:



atas dukungan dari:



Canada

Program
Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil
dalam Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh
2006 - 2009

Cetakan Pertama, Nopember 2006
viii, 39, 21 x26,7 cm

Penulis : Yappika
Pengantar : Yappika

Tata Letak : Moelanka
Cover : Moelanka

Diterbitkan oleh:

Yappika

Jl. Pedati Raya No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350
Phone: +62-21-8191623, Fax: +62-21-85905262, +62-21-8500670
e-mail: yappika@indosat.net.id
dan

USC Canada

Atas dukungan dana dari:
CIDA

Dicetak oleh:
Sentralisme Production
Jl. Percetakan Negara VB No. 2A-Jakarta Pusat
Telp/Fax: (021) 425 2133

Kata Pengantar

Dalam hampir dua tahun proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, koordinasi menjadi salah satu titik lemah yang terlihat, baik koordinasi antar sesama instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan lembaga donor dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), maupun antar sesama lembaga donor dan OMS sendiri. Salah satu penyebab dari lemahnya koordinasi ini adalah tidak mengalirnya informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Masing-masing pihak tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pihak lain, dimana lokasi kegiatannya dan apa yang menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Akibatnya, setiap pihak hanya berorientasi menyelesaikan pekerjaan dan targetnya sendiri, dan baru tersentak kaget ketika mengetahui bahwa apa yang dikerjakannya memiliki kemiripan bahkan kesamaan dengan yang dilakukan pihak lain.

Agar tidak mengulang kesalahan yang sama, dokumen ini sengaja kami terbitkan.

Penerbitan dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai Program Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh, yang dilaksanakan oleh Yappika dan USC Canada dengan dukungan dana dari Canadian International Development Agency (CIDA). Penerbitan dokumen ini diharapkan menjadi langkah awal bagi terbangunnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak yang sedang aktif bekerja dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Propinsi NAD.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Bagian 1: Pendahuluan	1
Bagian 2: Desain Program	3
2.1 Latar Belakang	3
2.2 Analisis Kerangka Logis (<i>Logical Framework Analysis</i>)	5
2.3 Komponen dan Kegiatan-kegiatan Utama Program	5
Bagian 3: Manajemen Program	25
3.1 Pendekatan Manajemen dan Struktur	25
3.2 Peran Para Pihak	27
3.3 Pertemuan-Pertemuan	29
Lampiran:	
Pohon Hasil Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh	30
Analisis Kerangka Logis (<i>Logical Framework Analysis</i>) Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh	31

Ringkasan Eksekutif

Program Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh adalah program berdurasi 3 tahun dengan dukungan dana CIDA sebesar C\$ 3.65 juta, dirancang untuk berkontribusi dalam proses pembangunan dan penguatan tata pemerintahan lokal di Propinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD). Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) agar dapat menyuarakan kepentingannya dan berperan aktif membangun kembali komunitasnya.

Program ini dilaksanakan melalui kemitraan antara USC Canada dan Yappika, bekerjasama dengan dua lembaga pengembangan sumberdaya di Aceh, yaitu Aceh Development Fund (ADF) dan Inspiring Management for People's Action (IMPACT). Yappika, dengan pengalaman yang selama ini telah dimilikinya, akan bertindak sebagai pengelola utama program. Yappika, ADF dan IMPACT secara bersama-sama akan memilih 14 OMS tingkat kabupaten dan dua jaringan OMS di tingkat propinsi untuk diikutsertakan dalam program. Pelaksanaan kegiatan akan difokuskan di Banda Aceh dan tujuh kabupaten lainnya, yaitu Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue dan Singkil.

Dua sasaran yang ingin dicapai program ini adalah; (1) menguat dan meningkatnya kapasitas OMS dalam mengembangkan partisipasi publik yang inklusif, dan mempengaruhi perumusan serta implementasi kebijakan pemerintah daerah maupun pihak-pihak strategis lainnya; dan (2) meningkatnya kapasitas *resource organisation* di tingkat propinsi dalam mendukung peningkatan ketrampilan OMS melakukan advokasi kebijakan dan pengorganisasian masyarakat.

Untuk mencapai kedua sasaran di atas, kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dikategorisasikan ke dalam tiga komponen utama, yaitu:

- ◆ Komponen 1: *Pengembangan Kapasitas untuk OMS terpilih di tingkat Kabupaten* agar dapat melakukan advokasi kebijakan dan mempromosikan partisipasi yang inklusif dari beragam kalangan OMS dan berbagai kelompok kepentingan
- ◆ Komponen 2: *Penguatan Resource Organisation di tingkat Propinsi*, memfokuskan perhatian pada membangun kapasitas dua organisasi, yaitu ADF dan IMPACT, untuk dapat memberikan fasilitasi, bantuan teknis dan *coaching* secara terus menerus kepada OMS di tingkat kabupaten
- ◆ Komponen 3: *Bantuan Teknis Yappika di Aceh* untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas OMS-OMS di Aceh, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten.

Hasil program pada tataran outcomes —yakni makin kuatnya OMS-OMS tingkat kabupaten dan meningkatnya kapasitas resource organisation di tingkat propinsi— akan secara langsung bermanfaat bagi OMS-OMS yang terlibat karena mereka mendapatkan ketrampilan baru dan kemampuan mengelola kelembagaan secara efektif. Kalangan pemerintah yang berinteraksi dengan mereka juga akan mendapat manfaat karena memperoleh berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif dengan kepentingan publik.

Hasil program pada tataran output —yakni meningkatnya ketrampilan dalam hal pengorganisasian komunitas, analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, pengembangan jaringan, membangun opini publik dan aliansi strategis, melakukan pelatihan, pengembangan sistem manajemen dan prosedur—akan memberikan manfaat bagi OMS yang berpartisipasi dan instansi pemerintah yang berinteraksi dengan mereka.

Baik CIDA maupun Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa penguatan masyarakat sipil merupakan prioritas utama dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Melalui peningkatan kapasitas OMS lokal di Aceh untuk berpartisipasi dalam dialog kebijakan dan mempengaruhi kebijakan publik, program ini akan berkontribusi terhadap tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia maupun CIDA.

Yappika and USC Canada meyakini bahwa kemajuan demokrasi dan tata pemerintahan tidak dapat dicapai tanpa secara eksplisit menerima kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Melalui program ini, USC Canada dan Yappika akan memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender, baik dalam struktur OMS maupun di dalam komunitas dimana program dilaksanakan.

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi dengan kekuatan 9,0 skala richter terjadi di ujung utara Pulau Sumatra, Indonesia. Gempa bumi tersebut diikuti dengan tsunami yang hebat yang menghancurkan kehidupan masyarakat di sepanjang pantai Propinsi NAD, dan di sebagian Propinsi Sumatera Utara. Tsunami juga menyebabkan korban jiwa dan kehancuran di beberapa kawasan Asia Selatan, bahkan hingga Afrika. Kerusakan dan kerugian akibat gempa dan tsunami yang diderita masyarakat di Indonesia sangat besar, melampaui negara-negara lainnya. Korban meninggal dilaporkan sebanyak 128.845 jiwa, dan yang hilang 94.682 jiwa. Sementara itu, jumlah orang yang menjadi pengungsi (IDP's) sebanyak 513.278 jiwa di Aceh dan 19.620 di Sumatera Utara. adalah sebagai berikut;

Bencana alam yang cukup besar ini telah memicu kehadiran bantuan internasional, baik untuk mengatasi kondisi darurat (*emergency*) maupun program rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat jangka panjang. Pemerintah Indonesia telah membuat master plan untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi, sekaligus membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang bertanggungjawab mengkoordinir seluruh kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagaimana tercantum dalam master plan, kegiatan rekonstruksi tidak hanya akan memfokuskan perhatian pada infra-struktur fisik, seperti perumahan, prasarana jalan dan pasar, tetapi juga mengembangkan struktur sosial masyarakat dengan memberi kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam membangun tata pemerintahan di wilayah mereka masing-masing. Dalam konteks revitalisasi pengembangan sosial inilah penguatan organisasi masyarakat sipil diperlukan agar mereka dapat berperan aktif dalam membangun kembali kehidupan masyarakat di Aceh.

Program ini akan meneruskan aktivitas penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam proses rekonstruksi Aceh, yang sebelumnya telah didukung oleh CIDA. Melalui Partnership Program for Development phase II (PPD II), assessmen telah dilakukan di 10 kabupaten yang terkena dampak tsunami untuk mengidentifikasi infrastruktur sosial dan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di tingkat lokal. Hasil assesmen menunjukkan bahwa dibutuhkan program peningkatan kapasitas untuk dapat memperkuat kemampuan OMS berpartisipasi lebih aktif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Beberapa temuan utama dari assesmen tersebut adalah sebagai berikut:

- ◆ Adanya kesenjangan antara OMS yang ada dengan kemampuan yang mereka miliki untuk memperkuat modal sosial di dalam komunitas (kelemahan dalam analisis sosial dan kapasitas pengorganisasian masyarakat)
- ◆ Kesadaran mengenai pentingnya membangun organisasi rakyat yang solid untuk memperjuangkan kepentingan bersama sudah muncul, tetapi masih ada masalah dalam kapasitas membangun organisasi
- ◆ Masyarakat pada umumnya sadar bahwa tanggungjawab pemerintah menyediakan pelayanan publik yang paling mendasar (seperti **kesehatan** dan pendidikan) tetapi kurang dorongan untuk menuntut tanggung jawab pemerintah menyangkut kebutuhan mereka

- ◆ Adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai proses penyusunan kebijakan dan saluran-saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka, termasuk tidak mengetahui bagaimana cara berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan
- ◆ Ada peningkatan jumlah organisasi baru, tetapi tidak memiliki visi yang jelas untuk pemberdayaan masyarakat dan lemah dalam membangun jaringan atau aliansi strategis

BAGIAN 2 DISAIN PROGRAM

2.1 Latar Belakang

Konteks Program

Sebelum tanggal 26 Desember 2004, akses ke Aceh oleh pihak luar, termasuk media massa dan NGO, amat dibatasi oleh serangkaian peraturan pemerintah dan operasi-operasi militer. Hal ini terutama disebabkan karena situasi konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada situasi seperti itu, pengembangan gerakan masyarakat sipil di Aceh amat terbatas. Mayoritas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Aceh dapat dideskripsikan sebagai aktor-aktor alternatif dan independen yang bekerja untuk isu HAM, hukum dan keadilan. Beberapa NGO yang bergerak untuk isu pengembangan masyarakat (community development) dan organisasi berbasis keagamaan juga ada dan melanjutkan keberadaannya di setiap desa, tetapi peran mereka bervariasi antar satu komunitas dengan komunitas lainnya

Bencana yang terjadi di Aceh telah mengakibatkan kerusakan yang cukup parah, namun pada sisi lain, juga telah membuka beberapa peluang. Sejak 26 Desember 2004, Aceh menjadi wilayah terbuka untuk dimasuki oleh sekitar 300 organisasi internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan dan terlibat dalam proses-proses rekonstruksi. Selain itu, penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah menyebabkan situasi yang lebih kondusif bagi OMS untuk terlibat dalam proses rekonstruksi dan pembangunan di Aceh pada masa-masa mendatang.

Namun demikian, peluang ini tidak dapat direspon secara memadai oleh OMS di tingkat lokal, karena keterbatasan kapasitas yang mereka miliki. Dari hasil beberapa assesmen yang dilakukan setelah bencana tsunami, keterbatasan kemampuan OMS lokal disebabkan oleh banyaknya aktivis yang hilang, baik karena meninggal dunia atau pindah tempat. Pada saat yang bersamaan, banyak LSM internasional dan nasional yang beroperasi di Aceh merekrut staf LSM lokal yang terbaik dan cerdas, sehingga berpengaruh juga terhadap kapasitas OMS lokal. Meskipun ada beberapa LSM tingkat nasional yang cukup kuat bekerja di Aceh, tetapi banyak LSM lokal atau kelompok masyarakat yang lemah kapasitasnya dalam pengorganisasian masyarakat, lobby, dialog kebijakan dan mengelola program mereka secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan terhadap peningkatan kapasitas OMS lokal merupakan unsur yang sangat penting dalam mempromosikan pemerintahan lokal yang demokratis di Aceh dan membantu masyarakat Aceh merealisasikan keinginan mereka untuk pembangunan kembali Aceh ke arah yang lebih baik.

Pelatihan, bantuan teknis dan pendampingan secara terus menerus merupakan kegiatan kunci dalam memberdayakan dan meningkatkan kapasitas OMS lokal untuk mengembangkan partisipasi publik yang inklusif, mempengaruhi kebijakan dan arah program dari pemerintah lokal maupun aktor-aktor pembangunan strategis lainnya. Peningkatan ketrampilan masyarakat dalam bidang analisis kebijakan dan anggaran, misalnya, dapat membangun kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan dan program-program yang disusun mengakomodasikan kebutuhan masyarakat

Keterkaitan dengan Kebijakan CIDA dan Pemerintah Indonesia

Baik CIDA maupun Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa penguatan masyarakat sipil merupakan prioritas utama dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Gagasan program ini mendukung tujuan program CIDA untuk rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara, melalui peningkatan kapasitas OMS di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan partisipasi publik yang inklusif dalam kegiatan-kegiatan rekonstruksi dan mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia sendiri dalam Master Plan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang disusun BRR menyebutkan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Lebih jauh lagi, tata pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan juga tercantum sebagai prioritas penting dalam rencana pembangunan Indonesia. Prioritas itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009, yang antara lain menyebutkan: (1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai (menyelesaikan konflik dan memerangi terorisme); (2) membangun demokrasi dan keadilan untuk semua warga negara (reformasi hukum, tata pemerintahan, mengembangkan transparansi dan akuntabilitas); dan (3) meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (akses terhadap pelayanan publik, menyediakan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih baik, dan pengembangan sumberdaya manusia). Merujuk pada rencana-rencana sebelumnya, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dan perekonomian, dan mendorong terjadinya pembagian tanggung jawab antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam mengimplementasikan strategi dan memonitor perkembangannya. Melalui peningkatan kapasitas OMS lokal di Aceh untuk berpartisipasi dalam dialog kebijakan dan mempengaruhi kebijakan lokal, program ini akan berkontribusi terhadap tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.

Mitra Kerja

USC Canada dan Yappika telah memilih dua lembaga di tingkat propinsi untuk menjadi mitra utama dalam melaksanakan program ini, yaitu ADF dan IMPACT. Kedua organisasi tersebut memiliki beberapa pengalaman dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada lembaga-lembaga di tingkat kabupaten, dan potensial untuk berkembang menjadi *service provider* peningkatan kapasitas pada masa mendatang. Program ini akan mengakselerasi potensi yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut dan mengembangkannya menjadi organisasi sumberdaya (*resource organisation*) yang berasal dari dalam wilayah Aceh sendiri. Selain dengan ADF dan IMPACT, program ini juga akan bekerjasama dengan 2 jaringan OMS tingkat propinsi dan 14 OMS di 7 kabupaten wilayah kerja program.

Wilayah kerja

Program ini akan memfokuskan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas di delapan wilayah kerja di Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue dan Singkil. Kegiatan peningkatan kapasitas untuk organisasi tingkat propinsi dan jaringan OMS akan dilakukan di wilayah Banda Aceh, dan untuk peningkatan kapasitas OMS tingkat kabupaten dilakukan di 7 kabupaten lainnya.

2.2 Analisis Kerangka Logis (*Logical Framework Analysis*)

2.2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari program Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan rekonstruksi dan pelayanan publik secara adil, partisipatif dan gender sensitif. Sedangkan sasarannya adalah memberdayakan dan meningkatkan kapasitas OMS di beberapa kabupaten terpilih dan di tingkat propinsi agar dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses rekonstruksi, khususnya berkaitan dengan perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan publik dan rekonstruksi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

2.2.2 Hasil yang diharapkan

Impact:

Partisipasi publik, baik laki-laki maupun perempuan, dalam perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar, lebih inklusif

Outcomes:

1. Menguat dan meningkatnya kapasitas OMS dalam mengembangkan partisipasi publik secara inklusif, baik laki-laki maupun perempuan, dan mempengaruhi perumusan serta implementasi kebijakan pemerintah daerah maupun pihak-pihak strategis lainnya
2. Meningkatnya kapasitas *resource organisation* di tingkat propinsi dalam mendukung peningkatan ketrampilan OMS melakukan advokasi kebijakan dan pengorganisasian masyarakat.

Outputs:

- 1.1 Meningkatnya keterampilan OMS terpilih di tingkat kabupaten dalam melakukan pendampingan masyarakat dan memperkuat modal sosial
- 1.2 Meningkatnya ketrampilan OMS terpilih di tingkat kabupaten dalam menganalisis kebijakan pelayanan publik dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah dan berbagai pihak strategis lainnya
- 1.3 Meningkatnya ketrampilan OMS terpilih di tingkat kabupaten dalam mengembangkan jaringan, mempengaruhi opini publik dan membangun aliansi strategis
- 1.4 Meningkatnya ketrampilan OMS terpilih di tingkat kabupaten dalam mengimplementasikan program kerjanya
- 2.1 Meningkatnya ketrampilan aktivis OMS di tingkat propinsi, baik laki-laki maupun perempuan, dalam melakukan pelatihan, bantuan teknis, *coaching*, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang inklusif

- 2.2 Berkembang dan berfungsinya mekanisme pembelajaran antar sesama (peer-learning) di dalam resource organisation di tingkat propinsi
- 2.3 Ada dan berfungsinya prosedur dan sistem manajemen dalam pemanfaatan sumber daya manusia, dan tersusunnya materi-materi untuk peningkatan kapasitas
- 2.4 Menguatnya jaringan dan hubungan kemitraan antar sesama OMS di tingkat propinsi untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas OMS dan mengembangkan/mempromosikan agenda bersama

2.3 Komponen dan Kegiatan-kegiatan Utama Program

Program Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh memiliki tiga komponen utama, yaitu:

- ◆ Pengembangan Kapasitas untuk OMS terpilih di tingkat Kabupaten
- ◆ Penguatan Resource Organisation di tingkat Propinsi; dan
- ◆ Bantuan Teknis Yappika di Aceh

Komponen 1: Pengembangan Kapasitas untuk OMS terpilih di tingkat Kabupaten

Komponen 1 ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat kapasitas OMS tingkat Kabupaten dalam melakukan advokasi kebijakan publik dan mendorong terjadinya partisipasi inklusif dari OMS dan wakil-wakil berbagai kelompok kepentingan dalam proses-proses penyusunan kebijakan publik yang formal. Beberapa sub-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan ini adalah; (a) pengembangan modal sosial; (b) analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi kebijakan; (c) pengembangan jaringan, lobby, mempengaruhi opini publik dan membangun aliansi strategis; serta (d) peningkatan ketrampilan dalam mengelola program.

Peningkatan kapasitas di bawah komponen ini akan diberikan kepada 14 OMS mitra yang terpilih dari 7 kabupaten di Aceh. Berbagai strategi akan dikembangkan sebagai sebuah kesatuan pelaksanaan advokasi kebijakan, mulai dari pengorganisasian kelompok basis; pelaksanaan riset dan analisis kebijakan; penyusunan naskah akademik, kertas posisi dan rekomendasi kebijakan (termasuk legal drafting); pelaksanaan kampanye publik untuk meraih dukungan berbagai pihak; serta aktivitas-aktivitas memahami situasi politik mikro secara mendetail, mengembangkan aliansi strategis dan jaringan kerja, serta melakukan lobby ke berbagai pihak penentu kebijakan tingkat Kabupaten.

Kegiatan utama untuk membangun kapasitas advokasi kebijakan di tingkat kabupaten ini adalah pelatihan, bantuan teknis, *coaching*, dan studi banding. Kegiatan-kegiatan ini akan dirancang dan dilaksanakan terutama oleh ADF, Impact dan Yappika, namun jika ada bidang-bidang tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh ketiga lembaga ini, maka dapat memanfaatkan sumberdaya dari luar.

Waktu pelaksanaan setiap jenis kegiatan peningkatan kapasitas tersebut akan disusun sesuai dengan perkembangan tingkat kapasitas organisasi mitra serta kemajuan pelaksanaan advokasi kebijakan di tiap kabupaten. Dengan mengingat bahwa ini program iterative maka jenis kebutuhan atas pelatihan, bantuan teknis atau *coaching* bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi di lapangan. Tugas utama dari ADF, Impact dan Yappika adalah membangun kapasitas organisasi mitra di Kabupaten terpilih agar mampu mengkapitalisasi berbagai jenis pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki menjadi sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi. Dengan demikian, proses peningkatan kapasitas yang akan dilakukan tidak hanya melalui training in-class, tetapi diikuti dengan penerapan langsung di lapangan.

1.1 Pengembangan Modal Sosial

Sub-komponen ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan pengorganisasian komunitas (community organizing) dalam rangka memperkuat/merevitalisasi modal sosial yang ada di tengah masyarakat. Hasil dari community organizing yang diharapkan adalah terwujudnya komunitas yang terorganisir (baik laki-laki maupun perempuan), yang sadar akan hak-hak dasarnya, mampu mengidentifikasi dengan tepat problem-problem mendasar yang mereka hadapi dan mencari solusi atas problem mendasar tersebut, serta merumuskan aturan-aturan dan mekanisme yang disepakati untuk gerakan bersama.

Pendekatan community organizing yang dilakukan akan berdasarkan pada kelompok-kelompok kepentingan (misalnya: buruh, nelayan, petani, kelompok keagamaan, masyarakat adat, organisasi perempuan, kelompok pemuda, miskin kota) dan bukan atas dasar wilayah administratif mukim, gampong, atau kecamatan. Dengan demikian, lembaga mitra kabupaten memang harus memikirkan secara serius kelompok-kelompok kepentingan apa saja yang perlu didampingi, sehingga mampu berpartisipasi untuk menggulirkan isu yang akan didorong menjadi kebijakan publik di tingkat Kabupaten.

Aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam sub-komponen ini terdiri dari:

- ***Pelatihan/bantuan teknis/coaching***

IMPACT dan Yappika akan bekerjasama melatih staf dari lembaga mitra kabupaten untuk menjadi pendamping komunitas (Community organizer/CO) yang memiliki kemampuan mengembangkan pemimpin informal dari komunitas yang didampinginya. Pelatihan yang akan dibuat mencakup antara lain: pelatihan CO, pendokumentasian perkembangan dinamika lapangan, kepemimpinan, analisis sosial dan gender, serta tema-tema lain yang menjadi kebutuhan dari kelompok dampingan. Bantuan teknis dan *coaching* melalui beberapa kunjungan akan dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pelatihan dapat diterapkan. Meskipun target utama dari pelatihan adalah staf lembaga mitra, tetapi pelatihan ini dapat juga diikuti oleh wakil komunitas dampingan yang dipercaya oleh

komunitas memimpin mereka dan/atau bertindak sebagai dinamisator lapangan. Program ini akan memastikan bahwa setiap lembaga mitra kabupaten akan mengembangkan kapasitas CO laki-laki maupun perempuan secara seimbang.

- **Pengorganisasian komunitas, termasuk penyediaan dana hibah skala kecil**

Yang dimaksud dengan pengorganisasian komunitas (community organizing) adalah seluruh kegiatan pendampingan yang dilakukan pada komunitas tertentu oleh pendamping komunitas (community organizer) untuk memastikan terjadinya konsolidasi sumberdaya komunitas yang didampingi. Bagian dari tugas community organizer adalah mendorong tumbuhnya kesadaran komunitas atas hak-hak dasarnya, sekaligus memastikan terbangunnya kemampuan komunitas mengorganisir diri, mengartikulasikan kepentingan, dan mengatasi persoalan-persoalan dasar yang dihadapi secara mandiri. Agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka program ini akan mendukung biaya-biaya yang diperlukan oleh community organizer, mencakup salary, transport dan hidup hidup selama di lokasi pendampingan, serta kebutuhan peralatan dari para community organizer tersebut. Program ini akan memastikan adanya pendampingan secara seimbang terhadap kelompok perempuan atau kelompok yang memperjuangkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan perempuan.

Dana hibah skala kecil (small grant) maksimum Rp 8.000.000 akan dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok kepentingan, sekaligus menjadi awal dari rangkaian usaha mengembangkan konsolidasi di tingkat komunitas. Tujuan dari pemberian small grant ini adalah untuk membangun kepercayaan dan mendorong komunitas untuk saling bekerjasama. Oleh karena itu, small tidak dapat digunakan untuk modal usaha atau digunakan untuk kepentingan individual. Jenis-jenis kegiatan yang dapat didukung dapat berupa: pembangunan sarana sosial yang dibutuhkan komunitas (lapangan bola, jembatan kecil, balai pertemuan); alat untuk menyelenggarakan event-event khusus kebudayaan dan olahraga yang dibutuhkan oleh komunitas (misal: bola kaki, toa, tikar); maupun juga dalam bentuk kenduri komunitas/ buka puasa bersama (pesejuk) untuk mempererat ikatan kekerabatan dengan komunitas yang didampingi. Proses untuk pemberian small grant akan disertai dengan analisis kemanfaatannya bagi perempuan maupun laki-laki.

Pertemuan komunitas akan diselenggarakan untuk mengidentifikasi akar masalah yang dihadapi komunitas, mendorong munculnya kesepakatan-kesepakatan dan aturan main ditengah komunitas, termasuk untuk memberikan ketrampilan baru (misalnya: kepemimpinan yang egaliter, ketrampilan berorganisasi dan mengembangkan program kerja bersama), serta merumuskan strategi aksi yang akan dilakukan bersama dalam rangka merespon/ mengantisipasi isu tertentu. Dalam pertemuan-pertemuan komunitas akan disinggung juga wacana kesetaraan gender

- **Magang/studi banding**

Magang/studi banding merupakan salah satu jenis aktivitas peningkatan kapasitas yang akan didukung melalui program ini. Community organizers akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi wilayah lain atau organisasi lain untuk belajar atau memperluas pengetahuan mereka. Tema magang/studi banding bervariasi, bisa untuk kebutuhan peningkatan kapasitas dasar dalam melakukan community organizing, bisa juga untuk meningkatkan pengetahuan dalam membangun inisiatif-inisiatif yang berbasis masyarakat. Disamping itu, bisa pula dimanfaatkan untuk melihat pengalaman pemerintah daerah lain dalam rangka mengembangkan tata-pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif memenuhi kebutuhan dasar warganya. Peserta kegiatan ini dipastikan akan ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki.

1.2 Peningkatan ketrampilan analisis kebijakan dan memproduksi rekomendasi kebijakan

Sub-komponen ini akan memfokuskan perhatian pada peningkatan kemampuan OMS mitra di kabupaten untuk dapat melakukan analisis kebijakan dan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang akan disasar berkaitan dengan pelayanan publik untuk pemenuhan hak sosial dasar masyarakat, baik dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi paska tsunami maupun akibat konflik yang berkepanjangan di Aceh, tergantung dari kondisi spesifik pada masing-masing kabupaten lokasi program. Rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan, tidak hanya diarahkan kepada pemerintah lokal, tetapi juga akan ditujukan kepada berbagai lembaga donor yang bekerja di daerah bersangkutan, agar program-program pelayanan yang mereka laksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang berkualitas. Melalui komponen ini diharapkan OMS mitra di Kabupaten dapat menghasilkan analisis kebijakan yang cukup solid berbasiskan pada data dan informasi yang valid, sehingga rekomendasi yang disampaikan memiliki argumen yang kuat untuk dapat diterima oleh berbagai pihak yang dituju.

Beberapa aktivitas yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Pelatihan/bantuan teknis/coaching**

IMPACT dan Yappika akan berkejasama melakukan training kepada staf OMS mitra di Kabupaten mengenai berbagai ketrampilan yang dapat menunjang mereka menghasilkan analisis kebijakan secara baik, mulai dari penggalan data lapangan melalui riset yang sistematis untuk mengumpulkan berbagai fakta yang terjadi di lapangan, penyusunan argumentasi dengan logika yang mudah dipahami banyak pihak, hingga penulisan rekomendasi yang rasional dan mudah diterapkan. Beberapa pelatihan yang akan dilakukan adalah: metodologi riset untuk kepentingan advokasi kebijakan (evidence-based policy advocacy

research), analisis kebijakan dan legal drafting, serta penulisan kertas posisi dan press release. Untuk peningkatan pemahaman, akan dilakukan juga beberapa pelatihan yang secara khusus mendalami isu-isu tertentu, seperti misalnya, analisis anggaran atau tema-tema lain yang menjadi kebutuhan. Yappika dan IMPACT juga akan memberikan bantuan teknis dan atau *coaching* pada saat analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan sedang berlangsung. Selain ditujukan terutama untuk staff OMS mitra, training ini juga bisa diikuti oleh individu-individu yang akan dilibatkan sebagai aliansi strategis dalam melakukan advokasi kebijakan yang diusung, baik dari kalangan perguruan tinggi, media massa, pesantren, maupun tokoh-tokoh masyarakat.

- **Pembuatan materi advokasi (riset kebijakan, naskah akademis, kertas posisi dan rekomendasi kebijakan)**

Riset kebijakan ditujukan untuk mempelajari secara mendalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut pelayanan publik yang ada di satu kabupaten dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat di daerah bersangkutan. Kegiatan ini akan dilakukan oleh OMS mitra di Kabupaten –dan aliansi strategisnya— yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya, melalui serangkaian proses pengumpulan dokumen kebijakan, penggalan data lapangan dengan cara interview mendalam maupun FGD, diskusi-diskusi di dalam tim studi secara intensif, dan penulisan laporan. Draft laporan akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dipandang relevan untuk memberi masukan (*peer-review*), untuk selanjutnya disusun menjadi laporan studi yang komprehensif. IMPACT dan Yappika akan memberikan bantuan teknis dan atau *coaching* kepada tim peneliti, sebagai kelanjutan dari pelatihan yang dilakukan secara in-class.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan kebijakan-kebijakan yang ada, baik menyangkut rumusan substansinya maupun dari segi implementasinya di lapangan, sekaligus mengetahui kekosongan kebijakan yang masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah —maupun pihak-pihak yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan pelayanan— kepada masyarakat. Riset kebijakan tidak hanya terbatas untuk kebijakan yang sudah ada. Tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan usul inisiatif untuk lahirnya sebuah kebijakan yang dirasa penting oleh masyarakat, apabila ada kekosongan kebijakan menyangkut masalah pelayanan publik tertentu.

Temuan dari kegiatan riset kebijakan juga akan dimanfaatkan untuk menyusun naskah akademik dan kertas posisi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai materi utama dalam advokasi di kabupaten tersebut. Sebelum hasil-hasil perumusan disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, akan dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan umpan balik atas rumusan-rumusan yang telah disusun. Dengan proses seperti ini, maka hasil rumusan yang dibuat benar-benar membuka ruang partisipasi publik, sekaligus menampung aspirasi atau kebutuhan yang dirasakan masyarakat

- **Magang/*study tours* untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan ketrampilan dari staf OMS kabupaten dengan memberi kesempatan mereka belajar dari organisasi-organisasi tingkat nasional maupun kabupaten lainnya yang memiliki banyak pengalaman dalam melakukan advokasi kebijakan. Dana disediakan untuk magang di sebuah lembaga agar dapat terlibat langsung dalam kegiatan advokasi atau mempelajari proses penyusunan analisis kebijakan maupun perumusan rekomendasi. Dari kegiatan ini peningkatan ketrampilan yang diharapkan diperoleh adalah teknik-teknik dan metoda pengumpulan data dan informasi untuk analisis kebijakan, metoda mereview dan mendalami kebijakan yang dianalisis, paradigma yang digunakan untuk melakukan analisis kebijakan dan merumuskan rekomendasi, metoda untuk menyusun argumen yang solid untuk rekomendasi yang diusulkan, dan bagaimana mengemas rekomendasi yang dibuat agar menarik perhatian pengambil kebijakan.

1.3 Pengembangan jaringan, mempengaruhi opini publik dan membangun aliansi strategis

Kumpulan kegiatan pada sub-komponen ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas OMS mitra Kabupaten untuk melakukan advokasi secara masif dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia, seperti lobby, hearing, public forum, pameran, kampanye media termasuk aksi massa jika memang diperlukan. Hasil yang diharapkan adalah terjadinya interaksi yang efektif antara OMS dengan para pengambil kebijakan sehingga memungkinkan diakomodasinya rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh OMS. Selain itu, akan dilakukan juga peningkatan kapasitas dalam hal mengkomunikasikan pandangan dan posisi OMS terhadap permasalahan kebijakan yang ada kepada khalayak luas secara sistematis, dengan harapan agar publik mau memberikan dukungan secara nyata terhadap apa yang diusulkan oleh OMS.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Pelatihan/*bantuan teknis/coaching***

Serangkaian pelatihan akan dilakukan oleh IMPACT dan Yappika kepada OMS mitra Kabupaten mengenai teknik dan strategi membangun interaksi dengan pengambil keputusan, menjalin kerjasama dengan media massa, menggali dukungan publik, termasuk juga bagaimana membangun jaringan secara efektif. Beberapa jenis training yang akan dilakukan adalah analisis peta politik mikro, lobby dan negosiasi, leadership, teknik fasilitasi, social marketing dan pengembangan media kampanye. Berbagai training ini diharapkan dapat membekali OMS mitra Kabupaten untuk dapat melakukan advokasi secara efektif. Selain dalam bentuk in-class, IMPACT dan Yappika juga akan mendampingi OMS mitra kabupaten dalam proses pelaksanaan advokasi paska pelatihan.

- **Pertemuan/Lokakarya (hearing/lobby dan pertemuan refleksi)**

Hearings dan lobby akan dilakukan oleh OMS mitra kabupaten dan aliansi strategisnya untuk menyampaikan usulan-usulan kepada pengambil keputusan. Kegiatan hearing akan dilakukan secara formal di kantor DPRD maupun pemerintah setempat, sementara lobby dilakukan secara informal dengan memanfaatkan momen-momen yang tersedia. Selain dilakukan secara bersama-sama, lobby juga akan dilakukan secara individual kepada aparat pemerintah dan anggota DPRD untuk memberikan penjelasan lebih detil tentang usulan-usulan yang disampaikan. Strategi lain yang akan dilakukan berkaitan dengan lobby ini adalah dengan melakukan diskusi reguler dengan para pengambil keputusan, dan tidak tertutup kemungkinan juga menjadi tim asistensi yang mendampingi fraksi-fraksi DPRD secara intens.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kerjasama dengan berbagai pihak yang dipandang sebagai aliansi strategis dari OMS mitra di kabupaten, akan dilakukan pertemuan reguler dengan pihak-pihak tersebut. Pertemuan reguler ini akan dimanfaatkan sebagai media sharing antar pihak, penyusunan rencana dan strategi advokasi, serta menjadi ajang refleksi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan secara bersama. Secara generik, pertemuan reguler akan dilakukan sebulan sekali, tetapi jika ada kebutuhan yang mendesak memungkinkan juga untuk dilakukan lebih dari satu kali sebulan.

- **Kampanye publik melalui iklan layanan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan (pameran, talk-show, pembuatan poster/leaflet)**

Kegiatan ini akan dilakukan untuk menyebarkan gagasan dan pandangan OMS mitra kabupaten mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu pelayanan publik yang diadvokasikan. Bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan dapat berupa pertemuan tatap muka dengan masyarakat melalui pameran, publik forum dan event-event publik lainnya atau dalam bentuk penyebaran bahan-bahan tertulis seperti leaflet, spanduk, sticker, petisi dan poster. Ruang-ruang komunikasi dengan publik ini juga akan dilakukan melalui kerjasama dengan stasiun radio dalam bentuk talkshow atau dialog interaktif. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kegiatan ini juga ditujukan untuk menjangkau umpan balik dan tambahan informasi dari masyarakat mengenai realitas yang terjadi di lapangan. Hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah mengalirnya dukungan publik terhadap isu-isu yang diadvokasikan oleh OMS mitra kabupaten, dalam bentuk penandatanganan petisi, mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait, terlibat dalam hearing dan aksi-aksi massa, atau bentuk-bentuk keterlibatan lainnya.

- **Relasi dengan media (press release/briefings/conference)**

Untuk memperluas kampanye atas isu-isu yang diadvokasikan, termasuk juga untuk menanggapi berbagai peristiwa yang berkaitan dengan isu yang diadvokasikan, OMS mitra kabupaten akan memanfaatkan media massa cetak

sebagai media kampanye. Bentuk kegiatannya dapat berupa press release, press briefing atau pers conference, tergantung dari kepentingan dan momentum yang ada. Akan dilakukan juga analisis media review untuk mengetahui kecenderungan perhatian media massa terhadap sebuah tema tertentu dalam rangka mengembangkan strategi advokasi yang lebih efektif.

1.4 Peningkatan ketrampilan implementasi program

Sub-komponen ini akan mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk penguatan kelembagaan OMS mitra kabupaten, baik dalam hal internal governance, pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan. Perhatian terhadap kapasitas kelembagaan ini penting dilakukan agar semua program yang dirancang dapat terlaksana dengan baik, dalam artian berjalan sesuai dengan rencana dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Pelatihan/bantuan teknis/coaching**

ADF dan Yappika secara bersama-sama akan memberikan pelatihan kepada OMS mitra kabupaten berkenaan dengan pengelolaan program dan keuangan. Dalam bidang pengelolaan program, beberapa ketrampilan yang akan menjadi perhatian menyangkut sistem pendokumentasian, monitoring lapangan dan penyusunan laporan perkembangan program. Sementara untuk bidang keuangan, selain pengelolaan keuangan sehari-hari, akan dikembangkan juga sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh pada setiap lembaga, termasuk pengembangan standar dan prosedur-prosedur keuangan yang memenuhi standar audit. Untuk mendampingi penerapan hasil in-class training, ADF dan Yappika juga akan memberikan bantuan teknis dan coaching secara rutin agar pengetahuan dan ketrampilan yang disampaikan dalam training menjadi terlembaga di dalam setiap OMS mitra kabupaten. Pada saat pendampingan rutin ini, perhatian juga akan diberikan untuk memastikan bahwa mekanisme kelembagaan, misalnya sistem kontrol dari pengurus terhadap pelaksana, berjalan sesuai dengan anggaran dasar setiap lembaga.

- **Core support**

Untuk memastikan bahwa semua rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka OMS mitra kabupaten akan mendapatkan dukungan operasional, yang dapat digunakan untuk sewa kantor, biaya komunikasi, biaya listrik, pembayaran salary, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan lembaga untuk melaksanakan program. Dalam kaitan ini, akan diberlakukan aturan-aturan yang menyangkut sistem pengadaan barang sesuai dengan standar CIDA dan ketersediaan bukti-bukti yang sah dan asli pada setiap pengeluaran uang demi terpenuhinya akuntabilitas lembaga dalam mengelola program.

Komponen 2: Penguatan *Resource Organisation* di tingkat Propinsi

Komponen 2 secara khusus ditujukan untuk membangun kapasitas dari 2 organisasi di tingkat propinsi, yaitu IMPACT dan ADF, agar dapat memberikan fasilitasi kepada OMS mitra kabupaten dengan baik. Beberapa sub-komponen telah dirancang untuk mencapai tujuan ini, yaitu pengembangan ketrampilan untuk aktivis OMS, pengembangan mekanisme pembelajaran sesama, pengembangan sistem manajemen dan prosedur, serta pengembangan/pelebaran jaringan dan kemitraan.

Organisasi yang kuat di tingkat propinsi dibutuhkan untuk melanjutkan peningkatan kapasitas terhadap OMS di tingkat kabupaten yang lebih kecil dan lebih lemah pada saat berakhirnya kerjasama dengan lembaga donor. Pendekatan dalam melakukan penguatan IMPACT dan ADF mencakup pelatihan langsung kepada 2 lembaga tersebut, diikuti dengan bantuan teknis dan coaching oleh Yappika agar ketrampilan mereka dapat langsung dipraktikkan dalam melatih dan memfasilitasi OMS di tingkat kabupaten. Kepada IMPACT, penguatan kapasitas akan mengarah pada kemampuan fasilitasi, baik teknik-teknik yang akan mereka gunakan maupun dalam hal penyusunan materi dan modul pelatihan yang akan disampaikan kepada OMS mitra kabupaten. Untuk dapat mengakselerasi dukungan yang diberikan IMPACT kepada OMS mitra kabupaten, akan dikembangkan pula mekanisme pembelajaran antar sesama (*peer learning*) yang sistematis dengan merefleksikan berbagai pengalaman yang mereka miliki. Sementara untuk ADF, peningkatan kapasitas terutama ditujukan untuk mendukung peran-peran ADF sebagai organisasi pengelola dana yang dapat memberikan asistensi dalam bidang pengelolaan program yang efektif, termasuk dalam melakukan monitoring dan pendokumentasian hasil-hasil kerja lapangan dengan baik. Untuk menjaga transparansi pengelolaan dana yang dilakukan, akan ditingkatkan pula kapasitas pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, bukan hanya untuk ADF sendiri tetapi juga untuk disebarluaskan kepada lembaga-lembaga yang menjadi dampingan ADF.

Selain memberikan perhatian kepada Impact dan ADF, komponen ini juga akan mendukung peran-peran forum/jaringan OMS — salah satu yang diperhatikan adalah jaringan CSO yang memperjuangkan aspirasi perempuan — yang ada di Banda Aceh untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota/partisipan sesuai dengan mandat mereka. Tujuannya agar forum/jaringan OMS benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga terjadi gerakan yang terkonsolidasi dalam melaksanakan isu-isu strategis yang telah dirumuskan bersama. Dalam kaitan ini, kapasitas yang akan ditingkatkan adalah bagaimana forum/jaringan dapat menjalankan mekanisme internalnya sesuai dengan statuta yang mereka miliki. Pada sisi lain, akan didorong pula sinergi antar forum/jaringan dalam mengadvokasikan isu-isu yang menjadi kepedulian bersama.

2.1 Peningkatan ketrampilan bagi aktivis OMS

Sub-komponen ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas fasilitator-fasilitator anggota IMPACT dan juga untuk staff ADF dalam mengembangkan media-media fasilitasi (metodologi dan media pendidikan populer – pendidikan orang dewasa), analisis anggaran, dinamika sistem untuk membaca geopolitik wilayah (*geographic profiling*), strategi fundraising, project development and management, internal audit, organizational development, MIS. Peningkatan kapasitas akan menggunakan

beragam metode, mulai dari Training of Trainers (ToT), coaching maupun pembelajaran bersama (peer learning) antar sesama fasilitator IMPACT dan ADF. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Training of Trainers (ToT)**

ToT akan dilakukan untuk membekali fasilitator Impact dan staf ADF dalam memberikan penguatan kapasitas kepada OMS di kabupaten. Training-training untuk IMPACT diantaranya: pengembangan metodologi dan media pendidikan populer, analisis anggaran, dinamika sistem, pemahaman/ pembacaan geopolitik wilayah. Sementara untuk ADF, beberapa training yang diperlukan adalah strategy fund raising, project development and management, manajemen strategis, internal audit, organisation development, dan manajemen sistem informasi. Yappika bertanggung jawab menyediakan pelatih untuk ADF dan IMPACT yang berasal dari dalam dan luar Aceh. ToT ini terbuka juga untuk staf forum/jaringan di Banda Aceh, sehingga mereka pun memiliki ketrampilan untuk melayani anggota/partisipannya yang tersebar di seluruh Aceh.

- **Pelatihan/bantuan teknis/coaching untuk OMS di tingkat Kabupaten**

IMPACT and ADF akan memberikan pelatihan/bantuan teknis/coaching kepada OMS mitra kabupaten, sesuai kebutuhan yang diajukan oleh mitra OMS kabupaten. IMPACT akan memberikan pelatihan pada bidang-bidang yang dapat menjamin proses-proses pendampingan masyarakat, pengembangan jaringan dan kampanye publik yang dilakukan OMS mitra kabupaten memiliki orientasi yang sesuai dengan perubahan yang diharapkan terjadi di kabupaten bersangkutan. ADF akan lebih banyak memberikan pelatihan pada pengembangan kelembagaan OMS mitra kabupaten, baik menyangkut pengelolaan program maupun keuangan yang dapat memenuhi internal governance yang baik, pengembangan partisipasi yang tinggi dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam berbagai kegiatan pelatihan yang akan diberikan kepada OMS mitra kabupaten, ADF akan bertindak sebagai panitia penyelenggara, sementara Impact akan memposisikan diri sebagai pelatih/fasilitator. Jika dibutuhkan pelatih dari luar Aceh untuk mendampingi IMPACT/ADF, maka akan menjadi tanggung jawab Yappika untuk memenuhinya.

Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kedua lembaga tersebut diharapkan tidak hanya akan berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi harus berkontribusi langsung terhadap kerja-kerja keseharian dari OMS mitra kabupaten. Dalam konteks inilah maka pendampingan yang intensif akan dilakukan oleh ADF dan IMPACT dalam seluruh periode program melalui kegiatan pemberian bantuan teknis (technical assistance) dan coaching terhadap OMS mitra kabupaten. Secara reguler, IMPACT dan ADF memantau perkembangan yang terjadi pada OMS mitra kabupaten dan kemudian merumuskan strategi penguatan lebih lanjut yang diperlukan. Untuk dapat mengukur tingkat

perkembangan kapasitas hasil pendampingan yang dilakukan, pada awal periode program. akan dilakukan assessment kapasitas lembaga mitra kabupaten. Hasil assessment ini akan dipandang sebagai base-line data yang dapat digunakan sebagai pembanding antara sebelum dan sesudah pendampingan dilakukan. ADF bertanggung jawab untuk mengumpulkan baseline data ini.

- **Lokakarya/pertemuan untuk refleksi perkembangan OMS kabupaten**

Serangkaian workshop/meeting dalam rangka mendiskusikan perkembangan situasi OMS di kabupaten yang didukung/difasilitasi akan dilakukan oleh IMPACT, ADF dan Yappika selama periode program berlangsung. Dalam workshop/meeting akan dibicarakan perkembangan kapasitas yang terjadi di kabupaten, termasuk soal perubahan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pendampingan.

2.2 Pengembangan mekanisme pembelajaran sesama (peer-learning)

Salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas IMPACT, ADF dan forum/jaringan yang bertindak sebagai pemberi pelayanan kepada OMS di tingkat kabupaten adalah mengembangkan mekanisme pembelajaran antar sesama pihak yang terlibat (peer learning mechanism). Kegiatan ini ditujukan untuk membagi pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh setiap individu menjadi pengetahuan dan ketrampilan bersama. Dengan demikian, pengetahuan dan ketrampilan tidak hanya akan dimiliki oleh seorang individu saja, tetapi dapat menyebar kepada banyak orang. Penyebaran pengetahuan dan ketrampilan ini penting dilakukan untuk mengakselerasi ketersediaan sumberdaya manusia yang dapat merespon kebutuhan OMS mitra kabupaten, sehingga dalam memberikan pendampingan kepada kabupaten tidak tergantung pada satu atau dua orang saja. Hasil-hasil kongkrit dari peer learning mechanism ini akan diukur dari tingkat keberhasilan setiap fasilitator IMPACT maupun staf ADF memberikan bantuan teknis dan coaching kepada OMS mitra kabupaten.

Peer learning mechanism akan dilandasi dengan semangat belajar bersama, berkembang bersama. Namun demikian, prosesnya tidak akan dilakukan secara tertutup dengan menafikan pandangan dan perspektif dari luar. Untuk memperkaya wawasan dan menambah inspirasi, akan dilakukan juga upaya-upaya penggalian pengetahuan dan ketrampilan dari berbagai pihak lainnya melalui kegiatan study tour maupun internship.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam sub-komponen ini adalah sebagai berikut:

- **Bantuan teknis dan Coaching**

Kegiatan ini akan dilakukan oleh IMPACT dan ADF kepada OMS mitra kabupaten, sebagai wahana untuk mengimplementasikan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh. Dengan kata lain, kegiatan coaching dan TA ini merupakan “batu uji” bagi fasilitator IMPACT dan staf ADF untuk membuktikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilannya melalui pendampingan mereka terhadap kerja-

kerja OMS mitra di kabupaten. IMPACT akan menunjuk seorang fasilitatornya untuk bertanggung jawab penuh terhadap peningkatan kapasitas OMS di satu kabupaten tertentu. Tugas dari fasilitator tersebut adalah; (a) mendampingi OMS mitra kabupaten merumuskan strategi advokasi yang tepat sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi di kabupaten bersangkutan; (b) mendampingi OMS mitra kabupaten agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan orientasi program dan capaian-capaian hasil yang dirumuskan; (c) mendampingi OMS mitra kabupaten dalam mengembangkan jaringan dan membangun aliansi strategis dengan berbagai pihak yang ada di kabupaten tersebut; (d) mengupayakan terpenuhinya berbagai kebutuhan peningkatan kapasitas dari OMS mitra kabupaten, dengan mengkomunikasikan hal tersebut kepada ADF, Yappika, atau fasilitator IMPACT lainnya.

Staf ADF akan memberikan perhatian terhadap peningkatan kinerja internal OMS mitra kabupaten dalam pelaksanaan program. Tugas utama yang harus dilakukan oleh staf ADF adalah; (a) mendampingi OMS mitra kabupaten mempraktekan internal governance sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga bersangkutan; (b) mendampingi OMS mitra kabupaten dalam mengembangkan sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel; (c) mendampingi OMS mitra kabupaten membuat laporan perkembangan program dan laporan keuangan sesuai dengan format-format yang telah disiapkan dan memenuhi jadwal yang telah disepakati; (d) menyelenggarakan training-training yang dibutuhkan oleh OMS mitra kabupaten.

Pengukuran mengenai efektifitas bantuan teknis/coaching yang diberikan oleh IMPACT maupun ADF akan dilakukan melalui survey kepuasan OMS kabupaten yang dilayani.

● **Lokakarya/pertemuan untuk untuk menyusun modul/manual**

Serangkaian workshop penyusunan manual/modul akan dilakukan oleh IMPACT, ADF dan Yappika mengenai tema-tema pelatihan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh OMS mitra kabupaten. Dalam workshop ini, setiap orang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilannya pada bidang tertentu akan diminta untuk membagi pengetahuan dan ketrampilannya kepada yang lain. Peserta yang hadir, akan memberikan komentar dan tanggapan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki sebagai pengayaan terhadap apa yang telah disampaikan. Seluruh hasil diskusi kemudian akan dirumuskan secara bersama-sama menjadi modul/manual pelatihan yang dapat digunakan oleh setiap orang. Jika diperlukan, workshop juga akan mengundang narasumber dari luar untuk memberikan tambahan informasi dan perspektif lain.

Untuk merefleksikan efektifitas penerapan modul/manual yang telah diterapkan di kabupaten, akan dilakukan pertemuan reguler setiap bulan antara IMPACT, ADF dan Yappika. Dalam pertemuan reguler ini akan dibahas kekuatan dan kelemahan dari modul/manual berdasarkan pengalaman penerapannya di lapangan, untuk kemudian dilakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan.

Pertemuan reguler ini akan menjadi sarana bagi proses aksi-refleksi-aksi dalam keseluruhan periode pelaksanaan program, sehingga pendekatan dalam pelaksanaan pendampingan kepada OMS mitra kabupaten dapat berjalan dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan.

- **Magang/Study tour**

Kegiatan ini ditujukan bagi fasilitator IMPACT untuk menambah pengetahuan dan ketrampilannya dalam mengembangkan materi dan metode fasilitasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat fasilitator IMPACT dalam mendampingi OMS mitra kabupaten. Oleh karena itu, tema-tema yang akan dipilih untuk dipelajari dalam kegiatan magang/study tour adalah yang memiliki keterkaitan dengan situasi kabupaten lokasi-lokasi program.

2.3 Pengembangan sistem manajemen dan materi-materi peningkatan kapasitas

Sub-komponen ini akan memberikan perhatian secara khusus untuk penguatan institusi OMS di tingkat propinsi, khususnya ADF dan IMPACT. Sistem manajemen yang efektif perlu dikembangkan oleh ADF agar dapat berfungsi sebagai resource organisation yang handal, baik dalam hal penyaluran dana maupun pengembangan program dan kelembagaan, termasuk pengembangan prosedur standar dalam pengelolaan dana dan berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program. Untuk IMPACT, Yappika akan membantu IMPACT dapat berfungsi sebagai asosiasi fasilitator/trainer yang memiliki sistem manajemen yang baik, dalam artian memiliki prosedur-prosedur standar untuk penyediaan jasa fasilitasi kepada berbagai pihak, berfungsinya hak dan kewajiban setiap anggota fasilitator, pengaturan jadwal yang pasti dalam alokasi sumberdaya manusia yang dimiliki, termasuk strategi peningkatan kapasitas untuk anggota fasilitator/trainer yang menjadi anggotanya.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Pengelolaan kegiatan dan peningkatan kapasitas staf**

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai resource organisation, ADF akan mengembangkan prosedur standar penyaluran dana yang dikelolanya, mencakup mengembangkan alat-alat yang sesuai untuk melakukan assesmen kapasitas kelembagaan lembaga mitranya secara efektif, dan mengembangkan bahan-bahan yang mendukung kebutuhan peningkatan kapasitas lembaga mitranya dalam melaksanakan program di lapangan. Sistem pendokumentasian yang baik akan dibuat berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan dana, monitoring perkembangan program, strategi fund-raising, dan assesmen kapasitas kelembagaan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai asosiasi fasilitator/trainer secara efektif, IMPACT akan mengembangkan prosedur-prosedur standar untuk dapat

diketahui oleh kalangan internal IMPACT maupun pihak-pihak lain yang ingin bekerjasama dengan IMPACT. Secara internal, prosedur standar perlu disusun untuk mengatur hak dan kewajiban fasilitator dan pengaturan alokasi sumberdaya fasilitator. Penyusunan prosedur-prosedur ini akan dilakukan melalui serangkaian rapat internal IMPACT dengan mengundang seluruh anggota asosiasi. Berkaitan dengan penyusunan materi-materi untuk bahan fasilitasi, akan dilakukan penyusunan modul/manual melalui serangkaian diskusi secara intensif antar sesama fasilitator IMPACT, dengan tidak tertutup kemungkinan mendatangkan pihak luar sebagai narasumber. Materi-materi yang akan diolah menjadi modul/manual merupakan gabungan dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama ini dan ditambah dengan beberapa rujukan yang diperoleh pada saat study tour/internship maupun training-training yang pernah diikuti. Bentuk modul/manual akan disusun dalam bentuk tertulis (booklet/leaflet) maupun dalam bentuk audio-visual untuk memudahkan bagi pihak-pihak yang ingin menggunakannya.

- **Sewa kantor, pembelian peralatan kerja dan biaya perawatan**

Program ini akan menyediakan biaya operasional pelaksanaan kegiatan, mencakup sewa kantor dan perawatannya, biaya komunikasi, ATK dan pembelian peralatan kerja termasuk sepeda motor.

- **Publikasi dan pengembangan perpustakaan**

Pengembangan perpustakaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan IMPACT atas berbagai rujukan yang dapat digunakan dalam mempersiapkan materi-materi training maupun fasilitasi. Tercakup dalam kegiatan ini adalah pembelian buku-buku, jurnal maupun publikasi-publikasi dalam bentuk audio-visual. Selain itu, IMPACT pun akan menerbitkan buku, manual/modul yang berhasil disusun dari berbagai pengalaman yang dimiliki.

2.4 Pengembangan jaringan dan kemitraan

Sub-komponen ini ditujukan untuk terciptanya sinergi kerja antara resource organisation, forum/jaringan, maupun aliansi-aliansi taktis yang dibentuk atas isu-isu yang berkembang pada saat tertentu. Pertemuan-pertemuan antar berbagai komponen tersebut akan dilakukan secara intensif untuk terjadinya saling tukar informasi mengenai kondisi masing-masing forum/jaringan dalam melakukan peningkatan kapasitas OMS di tingkat Kabupaten maupun mengenai isu-isu terkini yang penting untuk disikapi. Diharapkan dari pertemuan-pertemuan ini akan lahir strategi bersama untuk melakukan peningkatan kapasitas secara masif dengan orientasi yang jelas dan terarah terbangun kesepakatan untuk melakukan advokasi atas isu-isu yang krusial untuk disikapi secara bersama-sama.

- **Dukungan terhadap forum/jaringan OMS**

Program ini akan mendukung dua jaringan OMS tingkat propinsi untuk secara

khusus menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh anggota/partisipannya. Dukungan terhadap jaringan ini merupakan strategi untuk memperluas cakupan program ke sejumlah OMS yang bergerak pada isu-isu spesifik, sehingga terjadi sinergi antara isu-isu pelayanan publik yang diusung program ini dengan isu-isu lainnya. Untuk tetap menjamin komitmen program mengenai kesetaraan gender, maka salah satu jaringan yang akan didukung adalah jaringan yang memiliki perhatian utama pada isu gender.

- **Konsolidasi OMS dan kampanye bersama**

Yappika akan mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan konsolidasi antar berbagai jaringan OMS dan mitra-mitra kerjanya untuk membahas perkembangan situasi yang terjadi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar ada kesamaan sudut pandang antar sesama OMS dalam mensikapi situasi yang berkembang dan bagaimana mengkomunikasikannya kepada berbagai kalangan. Kesepakatan-kesepakatan dalam pertemuan konsolidasi dapat berupa rancangan untuk melakukan kampanye bersama dengan pesan yang jelas baik untuk dilakukan di tingkat propinsi maupun kabupaten.

Komponen 3: Bantuan Teknis Yappika di Aceh

Komponen ini akan mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan Yappika di Aceh berkaitan dengan peningkatan kapasitas ADF, IMPACT dan jaringan/forum OMS dalam pengelolaan program dan keuangan, sekaligus ditujukan untuk memastikan semua rencana program dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil-hasil yang diharapkan sesuai dengan disain program. Berkaitan dengan kapasitas ADF, Yappika akan melakukan technical assistance dan coaching agar ADF berkembang menjadi organisasi grant-making yang profesional di level Aceh. Sementara dalam kaitannya dengan IMPACT, Yappika akan mendukung organisasi pengembang kapasitas (service provider for capacity building) tersebut menemukan bentuk-bentuk peer-learning yang effective, sekaligus meningkatkan wacana dan ketrampilan dari para aktivis anggotanya. Yappika juga memiliki peran mendinamisir dan memperkuat relasi antar jaringan OMS di tingkat propinsi, dan antara jaringan OMS dengan program kerja yang diimplementasikan oleh ADF dan IMPACT sehingga terjadi sinergi gerakan OMS di Aceh.

3.1 Personal and Living allowance

Agar proses peningkatan kapasitas OMS di Aceh berlangsung secara efektif, maka Yappika menempatkan 3 orang stafnya di Aceh dalam jangka waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Meskipun jangka waktu program 3 tahun, staf Yappika akan ditarik kembali ke Jakarta setelah 2 tahun, untuk memberikan kesempatan kepada OMS di Aceh mengelola program secara mandiri. Staf Yappika akan terus memberikan bantuan teknis dan coaching selama tahun terakhir melalui kunjungan secara reguler dari Jakarta.

Pada tahap awal (6 bulan pertama), keberadaan staf Yappika akan banyak memberikan perhatian pada proses seleksi mitra dan pematangan konsep proposal

yang diajukan oleh mitra-mitra dari kabupaten agar sesuai dengan gagasan dasar program. Selain itu, staf Yappika juga akan mendampingi pengembangan sistem dan standar pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan untuk internal ADF dan IMPACT, serta membangun mekanisme kerja antar kedua lembaga tersebut dan mengembangkan mekanisme peer learning, baik di dalam masing-masing lembaga maupun antar lembaga.

3.2 Office and Coordination Expenses

Sub-komponen ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan program berjalan secara efektif, baik menyangkut pengaturan internal di dalam ADF, IMPACT dan Yappika maupun relasi dengan pihak-pihak lainnya. Beberapa kegiatan yang akan termuat dalam sub-komponen ini adalah; (a) reguler management meeting antara Yappika, ADF dan Impact; (b) membangun interaksi dan komunikasi yang rutin dengan stakeholder kunci diluar mitra program yang berada di Aceh dalam rangka exposure program, koordinasi program dan mencari dukungan terhadap program kerja; (c) menghimpun data-data yang penting guna mengembangkan data based program. Termasuk di dalam sub-komponen ini adalah pengadaan perlengkapan kantor untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program.

3.3 Monitoring/bantuan teknis/Coaching kepada OMS tingkat Kabupaten

Sub-komponen ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung ADF dan IMPACT dalam memfasilitasi mitra-mitra di Kabupaten, baik dalam hal peningkatan kapasitas maupun monitoring perkembangan program di lapangan. Untuk kepentingan monitoring, akan disusun rancangan monitoring yang memuat indikator-indikator pencapaian program. Rancangan monitoring yang akan disusun bersama dengan ADF dan IMPACT ini, akan menjadi tools dalam melihat perkembangan kapasitas kelembagaan, pengelolaan program dan keuangan, serta sejauhmana hasil-hasil yang dicapai dalam masa tertentu memiliki kesesuaian dengan orientasi program. Selain menyangkut alat monitoring, akan disusun pula format pelaporan yang dapat digunakan oleh setiap mitra. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah; (a) Monitoring 6 bulanan untuk Jaringan oms, IMPACT dan ADF; (b) bersama dengan ADF dan IMPACT melakukan monitoring mitra kabupaten; (c) membuat laporan reguler enam bulanan maupun tahunan; serta (d) melakukan kunjungan ke kabupaten, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

2.4 Strategi keberlanjutan

Program Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh telah dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan hasilnya. Pada akhir program diharapkan, dua organisasi di tingkat propinsi, ADF dan IMPACT akan memiliki ketrampilan pengelolaan program dan keuangan yang baik. ADF akan memiliki pengalaman membuat perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan efektif, serta mengelola dan

membuat laporan keuangan organisasi secara akuntabel. Dengan pengalaman-pengalaman ini, akan mudah bagi ADF menarik dukungan dari berbagai lembaga dana lainnya untuk keberlanjutan program organisasi. Sementara itu IMPACT akan menjadi pusat pengembangan sumberdaya OMS yang handal, memiliki tools dan perangkat fasilitasi yang lengkap, serta memiliki prosedur dan mekanisme yang berjalan dengan baik. Semuanya itu dapat menjadi modal dasar untuk menjalin relasi dengan berbagai pihak yang membutuhkan jasa pelayanan dari IMPACT.

Di tingkat kabupaten, pada akhir program, OMS-OMS yang terlibat dalam program ini akan memiliki kapasitas yang tinggi dalam mengelola keuangan lembaga, pendampingan masyarakat, analisis kebijakan dan mampu berkomunikasi dengan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Kemampuan dan ketrampilan-ketrampilan ini dapat meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan OMS-OMS bersangkutan.

2.5 Strategi kesetaraan Gender

Yappika and USC Canada meyakini bahwa kemajuan demokrasi dan tata pemerintahan tidak dapat dicapai tanpa secara eksplisit menerima kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Melalui program ini, USC Canada dan Yappika akan memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender, baik dalam struktur OMS maupun di dalam komunitas dimana program dilaksanakan. Beberapa strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Baik perempuan dan laki-laki dilibatkan secara penuh dalam berbagai tahapan program, termasuk penjangkauan kebutuhan, penyusunan rancangan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program
- Memastikan bahwa kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas dilakukan untuk menjamin adanya kesetaraan gender. Sebagai contoh, mempertimbangkan keseimbangan jumlah peserta perempuan dan laki-laki dalam pelatihan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengorganisasian masyarakat. Selain itu, pelatihan-pelatihan yang secara khusus mengenai analisis gender juga akan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pelaksana program dari berbagai tingkatan mengenai pentingnya kesetaraan gender.
- Memastikan bahwa jumlah pelatih dan staf OMS memiliki keseimbangan gender, minimum mencapai 30% perempuan. Yappika akan memastikan bahwa masing-masing organisasi memiliki pendamping masyarakat dari kalangan perempuan Aceh, untuk mengidentifikasi dan merespon isu-isu yang khusus dihadapi kaum perempuan, dan mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan di dalam komunitas mereka masing-masing

- Satu dari dua jaringan OMS yang dipilih sebagai mitra program adalah organisasi yang bergerak pada isu kesetaraan gender
- Staf pelaksana program akan mengumpulkan data pada semua tingkat pelaksanaan program dengan melakukan pemilahan jenis kelamin perempuan dan laki-laki (gender dis-agregate). Pelatihan akan dilakukan untuk pengembangan dan penggunaan dokumentasi dan alat-alat analisis yang sensitif gender.

BAGIAN 3 MANAJEMEN PROGRAM

3.1 Pendekatan manajemen dan struktur

Pihak-pihak utama yang terlibat dalam program ini adalah CIDA, USC Canada, Yappika, IMPACT, ADF, 14 OMS tingkat kabupaten dan 2 jaringan OMS tingkat propinsi. Selain pihak utama, ada juga pihak sekunder yaitu pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam program tetapi memiliki pengaruh terhadap pencapaian program seperti komunitas dampingan, pemerintah lokal, BRR dan OMS-OMS lain yang melakukan kerja-kerja advokasi.

Program ini memiliki Program Steering Committee (PSC) yang merupakan badan tertinggi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan terhadap segala hal yang berkaitan dengan program. PSC terdiri dari perwakilan CIDA, USC Canada, Yappika, ADF, IMPACT dan dua lembaga mitra Kabupaten yang dipilih secara bergantian di dalam pertemuan mitra. Keterlibatan banyak pihak dalam PSC dimaksudkan untuk membuka partisipasi yang luas dalam proses pengambilan keputusan.

Skema keorganisasian program dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

3.2 Peran para pihak

CIDA

CIDA akan mendukung pembiayaan program ini. CIDA akan terlibat dalam manajemen program secara umum melalui keterlibatannya dalam pertemuan Program Steering Committee (PSC) yang dilaksanakan setahun sekali, dan melalui monitoring ke lapangan. Program manajer CIDA akan memberikan persetujuan akhir atas rencana kerja, anggaran dan laporan-laporan perkembangan program. CIDA akan bertanggungjawab kepada masyarakat Canada sebagai pembayar pajak.

USC Canada

Peran utama USC Canada adalah menjamin pencapaian keseluruhan hasil program di tingkat outcomes. Sebagai lembaga yang menandatangani kontrak dengan CIDA, USC Canada merupakan penanggung jawab utama manajemen dan administrasi program, termasuk penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil yang diperoleh kepada CIDA. Namun dalam pelaksanaan program sehari-hari, USC Canada berkoordinasi dengan Yappika yang diikat oleh sebuah nota kesepahaman (MoU)

Yappika

Peran utama Yappika adalah melakukan peningkatan kapasitas ADF, Impact, dan Jaringan OMS dalam rangka melakukan peran-peran yang dimandatkan pada organisasi tersebut. Berkaitan dengan kapasitas ADF, Yappika akan melakukan technical assistance dan coaching agar ADF berkembang menjadi organisasi grant-making yang profesional di Aceh. Sementara untuk IMPACT, Yappika akan mendukung organisasi pengembang kapasitas (service provider for capacity building) tersebut menemukan bentuk-bentuk peer-learning yang effective, sekaligus meningkatkan wacana dan ketrampilan dari para aktivis anggotanya. Yappika juga memiliki peran mendinamisir dan memperkuat relasi antar jaringan OMS di tingkat propinsi, dan antara jaringan OMS dengan program kerja yang diimplementasikan oleh ADF dan Impact sehingga terjadi sinergi gerakan OMS di Aceh.

Disisi lain, Yappika menjadi organisasi yang secara langsung berhubungan, berkomunikasi serta melakukan proses pelaporan/pertanggunggugatan kepada USC Canada dan CIDA. Berkaitan dengan ini, Yappika secara aktif akan membantu ADF dan IMPACT mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yappika juga akan membantu ADF mereview laporan keuangan serta narasi mitra kerja Kabupaten, serta mendukung Jaringan OMS menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Yappika pun bertugas mengumpulkan, mereview laporan-laporan keuangan dan narasi dari masing-masing organisasi pelaksana (ADF, IMPACT, dan Jaringan OMS) untuk diformulasikan menjadi laporan tengah tahun dan laporan tahunan yang akan disampaikan kepada USC Canada.

Aceh Development Fund (ADF)

ADF merupakan mitra kerja utama Yappika dalam rangka melakukan seleksi mitra dan program kerja yang akan diimplementasikan oleh mitra OMS Kabupaten, mengelola grant untuk OMS Kabupaten, sekaligus mengembangkan kapasitas manajemen keuangan organisasi yang bersangkutan. ADF mempertanggunggugatkan pelaksanaan kerja-kerja kepada Yappika, melalui komunikasi intensif dan laporan-laporan tertulis (narasi dan keuangan), baik yang menyangkut operasional dan perkembangan kinerja internal organisasi ini maupun yang berkaitan dengan perkembangan program OMS Kabupaten kepada Yappika.

IMPACT

IMPACT memiliki peran utama mengembangkan kapasitas mitra Kabupaten dalam rangka manajemen program, serta keahlian-keahlian khusus yang diperlukan untuk melakukan advokasi kebijakan publik (seperti: analisis kebijakan, legal drafting, lobby, dan lain-lain). IMPACT juga akan bertanggung-jawab menjaga orientasi program terus terjaga.

IMPACT mempertanggung-gugatkan pelaksanaan kerja-kerjanya kepada Yappika dalam bentuk komunikasi intensif dan laporan-laporan (narasi dan keuangan) secara berkala.

Jaringan OMS

Peran jaringan OMS di tingkat propinsi adalah memberdayakan anggota mereka sesuai dengan mandat yang telah diberikan, dan melaksanakan mekanisme kelembagaan jaringan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dukungan program ini juga diarahkan untuk memfasilitasi proses-proses kolaborasi antar jaringan OMS dalam mensikapi dan/atau merespon isu-isu terkini yang terjadi di Aceh selama periode program. Jaringan OMS akan mempertanggung-gugatkan hasil-hasil kerjanya kepada Yappika dalam bentuk komunikasi intensif dan laporan-laporan (narasi dan keuangan) sesuai dengan program kerja yang menjadi bagian tanggung-jawabnya.

OMS tingkat kabupaten

OMS tingkat kabupaten adalah front-line pelaksana program di tingkat Kabupaten dengan tugas utama mendorong terjadinya peningkatan partisipasi publik, khususnya kelompok yang didampinginya, dalam proses perumusan kebijakan tentang pelayanan publik. Disisi lain, mereka juga adalah OMS yang diharapkan menjadi pelopor dalam membangun gerakan bersama untuk perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui pengoorganisasian komunitas dan kerja-kerja advokasi kebijakan. OMS tingkat kabupaten mempertanggunggugatkan hasil-hasil kerjanya kepada ADF dalam bentuk komunikasi intensif dan penulisan laporan-laporan (narasi dan keuangan) sesuai program kerja yang menjadi tanggung-jawabnya. Oleh karena itu, ADF akan mengembangkan perjanjian kerja-sama dengan para mitra tingkat Kabupaten ini.

3.3 Pertemuan-pertemuan

● **Pertemuan PSC**

Pertemuan PSC dilakukan setahun sekali, dengan agenda utama; (a) melaporkan perkembangan program selama satu tahun sebelumnya untuk menginformasikan kepada anggota PSC mengenai capaian hasil dan kendala-kendala yang dihadapi; (b) pemaparan perencanaan kegiatan program beserta anggaran yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya. Dokumen-dokumen perencanaan akan dibahas dan disetujui. Persetujuan yang diambil dalam rapat PSC (yang didalamnya hadir perwakilan CIDA), memberikan arti bahwa semua yang tertuang dalam dokumen telah mendapat persetujuan dari CIDA untuk dilaksanakan sepanjang satu tahun ke depan; (c) membahas isu-isu penting yang ada kaitannya dengan program, dan mendiskusikan kebijakan apa yang perlu diambil oleh PSC untuk mengantisipasi/mengatasi masalah yang muncul. Jika dianggap perlu, pertemuan PSC dapat mengundang beberapa pihak di luar program, baik dari kalangan pemerintah maupun lembaga donor lainnya, untuk menjadi narasumber atau memberikan masukan terhadap program, atau untuk membangun koordinasi yang lebih baik buat pelaksanaan program ke depan.

● **Pertemuan Mitra (*All Partner Meetings/APM*)**

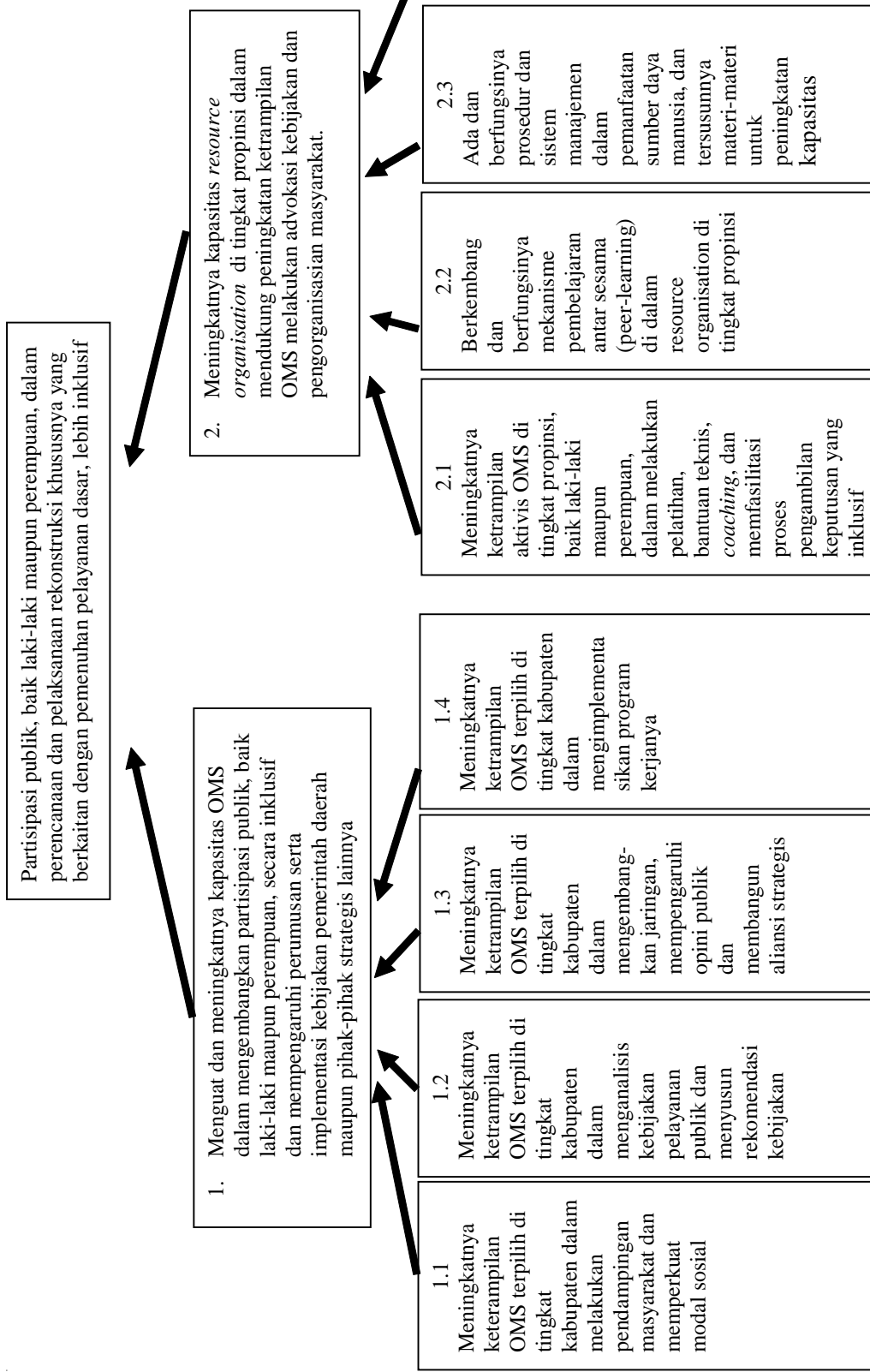
Pertemuan mitra dilakukan setahun sekali dan dihadiri oleh seluruh mitra yang terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Yappika, IMPACT, ADF, OMS tingkat kabupaten, dan jaringan OMS. Tujuan dari pertemuan mitra adalah; (a) mendiskusikan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi dan pelajaran berharga yang dapat dipetik untuk perbaikan tahun berikutnya; (b) mendapatkan masukan dari semua mitra kerja menyangkut perencanaan kegiatan tahun berikutnya, yang akan dikompilasi oleh Yappika untuk dipaparkan dalam pertemuan PSC; (c) menentukan wakil-wakil mitra kabupaten untuk hadir dalam pertemuan PSC .

● **Pertemuan manajemen (*Project Management Meetings/PMM*)**

Pertemuan manajemen program dihadiri oleh wakil-wakil Yappika, ADF dan IMPACT, yang dilakukan secara reguler setiap bulan sekali. Pertemuan ini merupakan media koordinasi, merefleksikan perkembangan program dan mendiskusikan perubahan strategi yang sesuai untuk mencapai hasil. Pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus, tetapi jika tidak tercapai konsensus Yappika memiliki otoritas sebagai pengambil keputusan mengingat Yappika terikat MoU dengan USC Canada.

Pohon Hasil

Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh



**Analisis Kerangka Logis (Logical Framework Analysis)
Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil
dalam proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh**

DESKRIPSI	HASIL	INDIKATOR	PENERIMA MANFAAT	ASUMSI DAN RESIKO
<p>Goal Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan rekonstruksi dan pelayanan publik secara adil, partisipatif dan gender sensitif.</p>	<p>Impact Partisipasi publik, baik laki-laki maupun perempuan, dalam perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar, lebih inklusif</p>	<p>Adanya kebijakan dan praktek pemerintah yang lebih responsif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkeadilan dan gender sensitive</p>	<p>Tidak langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekitar 976.000 warga di 7 kabupaten lokasi program • Pengambil kebijakan di tingkat nasional dan lokal 	<p>Asumsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada OMS untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan, seperti yang tertuang dalam UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan • Proses perdamaian berlanjut dan kondisi politik stabil <p>Indikator Resiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tidak membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan (sedang) • Kesepakatan Helsinki tidak dijalankan sehingga perdamaian dan keamanan di Aceh tidak terjadi

DESKRIPSI	HASIL	INDIKATOR	PENERIMA MANFAAT	ASUMSI DAN RESIKO
<p>Purpose memberdayakan dan meningkatkan kapasitas OMS di beberapa kabupaten terpilih dan di tingkat propinsi agar dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses rekonstruksi, khususnya berkaitan dengan perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan publik dan rekonstruksi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat</p>	<p>Outcomes 1. Menguat dan meningkatnya kapasitas OMS dalam mengembangkan partisipasi publik, baik laki-laki maupun perempuan, secara inklusif dan mempengaruhi perumusan serta implementasi kebijakan pemerintah daerah maupun pihak-pihak strategis lainnya</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas <i>resource organisation</i> di tingkat propinsi dalam mendukung peningkatan ketrampilan OMS melakukan advokasi kebijakan dan pengorganisasian masyarakat.</p>	<p>1.1 Tindakan yang diambil oleh OMS untuk mendiskusikan rekomendasi kebijakan dengan pembuat kebijakan. 1.2 Jumlah proses mekanisme pembuatan kebijakan formal, berkaitan dengan keterlibatan perwakilan komunitas (laki/perempuan) dalam pengambilan keputusan yang menyediakan pelayanan publik. 1.3 Jumlah, variasi dan derajat dari perwakilan masyarakat (laki/perempuan) yang terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut penyediaan pelayanan publik.</p> <p>2.1 Jumlah dan variasi institusi pemanfaat <i>resource organization</i>. 2.2 Spektrum pelayanan yang bisa diberikan oleh <i>resource organization</i> 2.3 Tingkat kepuasan client, laki dan perempuan, atas pelayanan yang diberikan oleh <i>resource organization</i>, termasuk jaringan OMS.</p>	<p>Langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OMS di 14 kabupaten dan 95 staf mereka • 6.300 anggota komunitas yang menerima bantuan teknis/fasilitasi dari community organizer (OMS) di 7 kabupaten • 4 organisasi/jaringan tingkat propinsi • komunitas NGO di Aceh yang mengakses fasilitator yang berkualitas <p>Tidak langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sekitar 31.500 anggota keluarga yang menjadi dampingan OMS • pihak-pihak lain yang dilayani oleh OMS yang menerima fasilitasi dari resource organisation tingkat propinsi 	<p>Asumsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRR tetap membolehkan keterlibatan OMS dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi melalui konsultasi publik dll • Hal ini dapat mempengaruhi pemerintahan lokal mengembangkan mekanisme bagi OMS untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan-kegiatan berkaitan rekonstruksi • OMS dan organisasi-organisasi di tingkat propinsi dapat tetap mempertahankan staf/fasilitatornya mengikuti pelatihan peningkatan ketrampilan <p>Indikator resiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRR mengabaikan pandangan-pandangan MS dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rendah) • Staf/fasilitator yang terlatih dapat meninggalkan organisasi mereka untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi di NGO internasional (rendah)

DESKRIPSI	HASIL	INDIKATOR	PENERIMA MANFAAT	ASUMSI DAN RESIKO
<p>Input/kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengumpulan data dasar (baseline) dan analisis gender o Penjajakan kebutuhan OMS secara partisipatif o Pelatihan, lakakarya, bantuan teknis dan coaching pada bidang-bidang analisis sosial, perencanaan partisipatif, pengorganisasian komunitas, pengelolaan organisasi dan keuangan, penganggaran, analisis kebijakan dan advokasi, legal drafting o Magang dan studi tour o Pengembangan materi-materi pengembangan kapasitas o Dialog dan lobby o Pembentukan jaringan o Sharing dan refleksi o Produksi spanduk, sticker, iklan layanan masyarakat dan talkshow o Penyediaan dana hibah <p>Sumber daya: CIDA: C\$ 3,6 juta USC: C \$ 50.000</p>	<p>Outputs</p> <p>1.1 Meningkatkan keterampilan OMS terpilih di tingkat kabupaten dalam melakukan pendampingan masyarakat dan memperkuat modal sosial di tengah-tengah anggota komunitas</p> <p>1.2 Meningkatkan ketrampilan OMS terpilih di tingkat kabupaten dalam menganalisis kebijakan pelayanan publik dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah dan aktor-aktor pembangunan lainnya</p>	<p>1.1.1 Jumlah dan kualitas kesepakatan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi komunitas yang didampingi OMS mitra kerja termasuk kesepakatan & prosedur yang sensitive gender</p> <p>1.1.2 jumlah dan jenis masalah yang diidentifikasi berhasil diselesaikan oleh OMS dengan dukungan dari community organizer</p> <p>1.2.1 Jumlah dan kualitas rekomendasi yang diproduksi oleh OMS.</p> <p>1.2.2 Pemanfaatan hasil-hasil analisis kebijakan dan rekomendasi oleh pemerintah dan organisasi</p>	<p>Langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 40 community organizer (staf dari OMS di 14 kabupaten) o 14 analis kebijakan/legal drafter (staf dari OMS di 14 kabupaten) o 14 staf advokasi/jaringan dari 14 OMS di kabupaten o 95 staf dari OMS di 14 kabupaten o 126 tokoh masyarakat yang didampingi oleh 14 OMS di 7 kabupaten o 6300 anggota komunitas yang mendapat manfaat dari dana hibah yang dilaksanakan di daerah mereka o penerima dari materi-materi pendidikan publik 	<p>Assumptions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OMS memahami pentingnya membangun organisasi yang solid agar mampu menyampaikan aspirasi dan mempunyai kemampuan untuk menyampaikan kepedulian dan kepentingannya pada arena publik dan di depan pembuat kebijakan. <p>Indikator resiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain training OMS tidak mengembangkan kapasitas dan kepercayaan dirinya untuk berkomunikasi dengan pembuat kebijakan (rendah) • Membanjirnya dana dan program dari organisasi-organisasi internasional menyebabkan terpecahnya perhatian mitra terhadap program yang dijalankan (rendah)

DESKRIPSI	HASIL	INDIKATOR	PENERIMA MANFAAT	ASUMSI DAN RESIKO
	<p>1.3 Meningkatnya ketrampilan OMS terpilih di tingkat kabupaten dalam mengembang-kan jaringan, mempengaruhi opini publik dan membangun aliansi strategis</p>	<p>1.3.1 Jumlah publik, laki dan perempuan, yang mendukung isu, melalui antara lain: penandatanganan petisi, keikutsertaan dalam aksi masa, memberikan komentar di media.</p> <p>1.3.2 Jumlah dan tipe organisasi yang tergabung dalam jaringan/koalisi.</p> <p>1.3.3 Jumlah aliansi strategis yang dibangun dan tingkat dukungan terhadap isu-isu yang diangkat oleh jaringan</p>	<p><i>Tidak Langsung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 6300 anggota komunitas yang menerima bantuan teknis/fasilitas secara langsung dari community organizer (OMS) di 7 kabupaten anggota komunitas lainnya yang meningkat kepeduliannya akibat mendengarkan talkshow/iklan layanan publik 	
	<p>1.4 Meningkatnya ketrampilan OMS terpilih di tingkat kabupaten dalam mengimplementasikan program kerjanya</p>	<p>1.4.1 Kinerja OMS di kabupaten dalam melakukan pendokumentasian, monitoring dan laporan perkembangan program.</p> <p>1.4.2 Laporan tepat waktu</p>		

DESKRIPSI	HASIL	INDIKATOR	PENERIMA MANFAAT	ASUMSI DAN RESIKO
	<p>Outputs</p> <p>2.1 Meningkatkan ketrampilan aktivis OMS di tingkat propinsi, baik laki-laki maupun perempuan, dalam melakukan pelatihan, bantuan teknis, <i>coaching</i>, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang inklusif</p>	<p>2.1.1 Jumlah training/TA/coaching dan fasilitasi yang dilakukan tiap aktivis OMS</p> <p>2.1.2 Jenis ketrampilan yang dimiliki oleh anggota organisasi pengemba sumber daya (laki/Perempuan)</p>	<p>Langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 aktivis (anggota fasilitator yang dikelola Impact) • 2 resource organisation tingkat propinsi (Impact dan ADF) dan staf mereka • 2 jaringan OMS • 65-80 OMS yang menjadi anggota dari jaringan OMS <p>Tidak langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 community organizer yang menerima bantuan teknis dan coaching dari 17 orang aktivis klien dari Impact yang memanfaatkan layanan mereka • OMS lain pada tingkat propinsi maupun kabupaten yang menerima dukungan (bantuan teknis, pelatihan, dana) dari resource organization atau jaringan tingkat propinsi 	

DESKRIPSI	HASIL	INDIKATOR	PENERIMA MANFAAT	ASUMSI DAN RESIKO
	<p>2.2 Berkembang dan berfungsinya mekanisme pembelajaran antar sesama (peer-learning) di dalam resource organisation di tingkat propinsi</p> <p>2.3 Ada dan berfungsinya prosedur dan sistem manajemen dalam pemanfaatan sumber daya manusia, dan tersusunnya materi-materi untuk peningkatan kapasitas</p> <p>2.4 Menguatnya jaringan dan hubungan kemitraan antar sesama OMS di tingkat propinsi untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas OMS dan mengembangkan/ mempromosikan agenda bersama</p>	<p>2.2.1 Jumlah mekanisme peer-learning yang dikembangkan dan dipraktikkan termasuk mekanisme untuk membahas gender equality mainstreaming).</p> <p>2.3.1 Kualitas sistem management dan prosedur, dan adanya kebijakan yang mempertimbangkan kesetaraan gender Jenis dan kualitas dari materi-materi yang dikembangkan dan digunakan baik oleh OMS tingkat provinsi maupun kabupaten.</p> <p>2.3.2</p> <p>2.4.1 Jumlah dan kualitas kerja sama yang dikembangkan diantara OMS tingkat propinsi, termasuk jaringan OMS.</p>		

PROJECT IMPLEMENTATION SCHEDULE												
ACTIVITY	FY 1				FY 2				FY 3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
WBS 100												
Capacity Building on Rebuilding Social Capital												
110 Training/TA/Coaching on Social Analysis, Participatory Planning and Community Organizing												
120 Organize communities & fund small projects												
130 Organize study tours and internships to enhance community organizing skills												
WBS 200												
Capacity Building on Policy Analysis and Recommendations												
210 Training/TA/Coaching on budgeting, policy analysis, legal drafting												
220 Product development that include conduct research and policy studies and develop position papers and policy recommendations												
230 Organize study tours and internship to enhance skills on policy analysis and legal drafting												
WBS 300												
Capacity Building in Networking, Public Opinion & Strategic Alliances Building												
310 Training/TA/Coaching on policy advocacy, lobbying, policy dialogue and public campaign												
320 Meetings and workshops												
330 Media management and public events												
WBS 400												
Capacity Building on Program Delivery												
410 Support/facilitation/TA in organizational management, program delivery and financial management and book-keeping												
WBS 500												
Capacity Building for Provincial Level Resource Organizations												
510 Training of Trainers and training of facilitators												
520 Training/TA/Coaching to district level CSOs												
530 Workshops to reflect on progress												
WBS 600												
Development of Peer-Learning Mechanisms												
610 Coaching and TA to develop peer-learning mechanisms												
620 Meetings and workshops to enhance the learning process among IMPACT's trainers/facilitators and to improve effectiveness of the capacity building methodology												
630 Organize study tours and internships to further knowledge about peer-learning mechanisms												
WBS 700												
Development of Management Systems and Procedures												
710 Develop management systems and procedures												
720 Setting up office, purchase equipment, pay operational expenses												
730 Develop modules/manuals for capacity building and set up library and purchase relevant films, CD-ROM and books												

Kerjasama:



Atas dukungan dana dari



Yappika (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi) merupakan aliansi organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk mengembangkan masyarakat sipil yang demokratis, independen, mandiri dan menghargai pluralisme. Sejak pendiriannya pada 1991, Yappika terus mendukung pemberdayaan organisasi masyarakat sipil, khususnya ornop. Empat program strategis yang saat ini dikembangkan Yappika adalah: (1) Membangun perdamaian dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) Mendukung prakarsa rakyat untuk pengembangan tata-pemerintahan lokal yang demokratis; (3) Membangun warganegara yang aktif; (4) Menuntut tanggungjawab negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat;